



Politik dan Pesantren Studi Kasus Pesantren Darul Arafah Raya

Kuperju Syahputra Ritonga

Universitas Sumatera Utara

Alamat: Jalan Dr. T. Mansur No. 9, Medan, 20155, Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis: kuperjushyahputra2001@gmail.com

Abstract. *This writing is motivated by the relationship between politics and Islamic boarding schools, with a focus on the case study of Darul Arafah Raya Islamic Boarding School. Islamic boarding schools, as traditional Islamic educational institutions, play a strategic role in shaping the character and religious understanding of society. In the Indonesian context, where political dynamics often interact with religious values, Islamic boarding schools function not only as social entities that can influence and be influenced by political changes. The methodology used in this study is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. Research related to politics and Islamic boarding schools shows that Darul Arafah Raya Islamic Boarding School has a dual role as a place of religious education and as an arena for political discourse. The boarding school leaders are involved in local political activities, both through supporting leadership candidates and educating students about the importance of participation in the democratic process. Pesantren Darul Arafah Raya plays an important role in the local political context, but this needs to be balanced with efforts to maintain the integrity of religious education. The role of this pesantren also strengthens the curriculum that promotes moral values and ethical leadership in politics and encourages active participation by students.*

Keywords: *Politics, Pesantren Darul Arafah Raya, Participation, Leadership*

Abstrak. Tulisan ini dilatar belakangi oleh hubungan antara politik dan pesantren, dengan focus pada studi kasus Pesantren darul Arafah Raya. Pesantren sebagai institusi Pendidikan Islam tradisonal memiliki peran strategis dalam pembentukan karakter dan pemahaman keagamaan Masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana dinamika politik sering kali berinteraksi dengan nilai-nilai keagamaan, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai entitas social yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan politik. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan analisis dokumen. Penelitian terkait politik dan pesantren menunjukkan bahwa Pesantren Darul Arafah Raya memiliki peran ganda sebagai tempat Pendidikan agama dan sebagai arena diskursus politik. Para pengasuh pesantren yang terlibat dalam kegiatan politik local, baik melalui dukungan terhadap calon pemimpin maupun dengan megedukasi santri tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Pesantren Darul Arafah Raya memainkan peran penting dalam konteks politik local, namun perlu diimbangi dengan upaya menjaga integritas Pendidikan agama. Peranan pesantren ini juga memperkuat kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam berpolitik serta mendorong partisipasi aktif santri.

Kata Kunci: Politik, Pesantren Darul Arafah Raya, Partisipasi, Kepemimpinan

LATAR BELAKANG

Agama merupakan system kepercayaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan serta tata kaidah yang berkaitan dengan pergaulan antar manusia beserta lingkungannya. Dalam bahasa Sanskerta istilah agama berarti kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati yang lebih tinggi, secara etismologis berasal dari kata latin *religio* yang memiliki arti mengikat kembali. Agama akan memberikan panduan mengenai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta serta pengawas pada alam semesta. Agama juga menghimpun tata cara ibadah dan ritual yang dilakukan oleh penganutnya. Agama

juga menyediakan pedoman dalam interaksi sosial serta perilaku di tengah masyarakat sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, mendidik umat tentang nilai-nilai moral dan etika, mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma sosial, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas (Putra et al., 2022).

Di Indonesia, hubungan antara agama dan politik diatur dalam kerangka Pancasila, yang mengakui keberagaman agama tetapi tetap menjaga agar negara tidak didominasi oleh satu agama tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kehidupan beragama dan politik yang demokratis. Agama dapat menjadi landasan pedoman dalam kehidupan termasuk dalam berpolitik dan bernegara. Agama dan politik memiliki hubungan yang erat, terutama pada masyarakat yang masih menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Keterkaitan dua hal yang berbeda ini dapat di jelaskan dalam beberapa aspek, yakni Agama sebagai landasan moral dalam politik, agama menyediakan nilai-nilai etika serta moral yang digunakan dalam praktik politik, seperti keadilan, kejujuran serta kesejahteraan sosial. Agama juga berkaitan kepada seorang pemimpin, di mana pemimpin politik sering menggunakan ajaran agama sebagai dasar pengambilan keputusan serta kebijakan publik. Politik sebagai sarana implementasi nilai-nilai agama, politik dapat memberikan ruang bagi kelompok-kelompok keagamaan terkait mengadvokasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip agama mereka. Selanjutnya beberapa negara juga mengadopsi hukum yang berbasis agama dalam sistem politiknya, meskipun di Indonesia sistem yang dianut merupakan Pancasila yang bersifat inklusif terhadap semua agama. Partisipasi kelompok keagamaan dalam politik, organisasi keagamaan sering kali juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Lembaga keagamaan juga terlibat dalam mengarahkan pemilih untuk memilih pemimpin yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai agama mereka. Politik identitas dan politisasi agama, dalam beberapa kasus, agama dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan, seperti dalam kampanye pemilu yang menggunakan isu agama untuk menarik simpati pemilih. Politisasi agama dapat memicu konflik serta polarisasi di masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Tantangan dalam menjaga keseimbangan antara agama dan politik, bagaimana memastikan bahwa politik tetap inklusif tanpa diskriminasi berbasis agama. Menghindari penyalahgunaan agama dalam politik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa (Aminullah, 2020).

Peran agama dalam kehidupan politik di negara Indonesia sangatlah kompleks serta beragam. Landasan konstitusional dan ideologis yakni Pancasila dengan sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan jelas menegaskan peran penting agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir untuk menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara, sekaligus menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama. UUD 1945 yang juga menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap warga negara. Negara tidak mendirikan agama negara, tetapi mengakui keberadaan dan peran penting agama dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh agama dalam politik praktis di mana beberapa partai politik di Indonesia memiliki basis massa atau ideologi yang terkait dengan agama tertentu. Organisasi keagamaan seringkali kali

terlibat dalam kegiatan politik baik seperti kampanye pemilu atau advokasi kebijakan publik. Kemudian dalam nilai-nilai agama juga seringkali memengaruhi pembentukan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan moralitas, etika dan kesejahteraan sosial. Tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Agama dapat menjadi faktor penting dalam mobilisasi massa untuk tujuan politik, baik untuk mendukung maupun menentang suatu kebijakan atau bahkan kandidat (Putra, 2018).

Pemikiran politik menurut Muhammad Abduh secara umum memperlihatkan perhatiannya yang terfokus pada demokrasi. Sekalipun demikian ia tetap tidak mengabaikan *syari'ah* atau memisahkan agama dari politik. Pembaharuan di bidang politiknya masih dalam kerangka ajaran Islam. Dengan kata lain apa yang dilakukan oleh Muhammad Abduh adalah upaya-upaya melakukan penafsiran baru terhadap ajaran Islam, melalui rasionalisasi, mendamaikan Islam dengan akal dan juga ilmu pengetahuan modern, dan juga upayanya mendamaikan antara cita-cita Islam dengan realitas politik (Katimin, 2007). Politik agama adalah menjadikan agama sebagai landasan dalam berpolitik, sementara politisasi agama menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan politik pragmatis. Negara menggunakan agama untuk mengikat warga negara agar mematuhi aturan yang ada. Agama menjadi moral dalam politik dan negara menggunakan agama untuk mengikat masyarakat pada norma serta aturan. Agama menjadi identitas yang kuat dalam masyarakat Indonesia, dan mayoritas responden survei berpendapat bahwa urusan agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Partai politik di Indonesia menerapkan strategi politik identitas untuk memperoleh kemenangan (Widiatmaka & Yuliandari, 2024).

Politik dan agama dengan studi kasus pada Pesantren Darul Arafah Raya akan menjadi perdebatan terkait sejauh mana agama boleh berperan dalam pendidikan publik. Di negara yang multikultural ini sistem pendidikan sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan ajaran agama dengan nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Dengan ini secara keseluruhan baik aspek agama dan juga politik dalam bidang pendidikan akan saling berkaitan dalam pembentukan kebijakan, kurikulum, regulasi serta dinamika sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan suatu negara (Rohim, 2015).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang lebih menekankan pada deskripsi, proses, dan makna dari suatu fenomena. Sugiono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif lebih cocok untuk meneliti kondisi alamiah dan fenomena sosial, serta menggunakan metode seperti wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam perspektif, makna, dan konteks suatu fenomena (Nasution, 2023). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menciptakan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang hubungan antara peristiwa, sifat, dan fenomena yang diteliti. Analisis

deskriptif merupakan analisis yang menggambarkan suatu gejala atau fenomena secara lebih rinci (Wekke, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pesantren Dalam Masyarakat Indonesia

Pesantren yang sejak awal berdirinya merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas Indonesia. Pada pendidikan agama, dapat membekali santri dengan ilmu-ilmu keislaman seperti fikih, tauhid, tafsir, hadits, akhlak dan tasawuf. Secara pendidikan umum, banyak pesantren modern juga mengintegrasikan kurikulum nasional, sehingga para santri memperoleh ilmu pengetahuan umum (IPA, IPS, Bahasa dan juga teknologi). Selain itu pesantren juga menjadi wadah dalam menyiapkan generasi yang dianggap mampu menjadi ulama, guru agama, tokoh masyarakat bahkan menjadi pemimpin bangsa.

Pada kehidupan sosial, pesantren bukan hanya suatu lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi pusat kehidupan masyarakat sekitar. Baik menjadi pusat dakwah yang menyebarkan ajaran Islam, menjaga moral dan membina umat. Menjadi penguatan nilai sosial dimana menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong serta ukhuwah atau persaudaraan. Pesantren juga sering membuka klinik kesehatan, bimbingan keagamaan, kegiatan sosial (zakat, infak, sedekah). Kemudian pesantren dapat juga menjadi wadah pengentasan buta huruf karena sejak dulu pesantren berperan mencerdaskan masyarakat pedesaan (Subekti & Fauzi, 2018).

Pada kehidupan ekonomi, pesantren berfungsi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat. Banyak pesantren yang mengembangkan koperasi, pertanian, peternakan hingga UMKM. Kemandirian pesantren dengan adanya usaha ekonomi, pesantren bisa membiayai operasional tanpa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Selanjutnya melalui pelatihan wirausaha, pesantren mencetak santri dan masyarakat yang berdaya saing.

Walau tidak semua pesantren terjun langsung ke politik praktis, tetapi pesantren memiliki pengaruh yang besar. Sejarah mencatat pesantren berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Wahid Hasyim. Pesantren mengajarkan nilai etika, kejujuran dan juga keadilan dalam kehidupan berbangsa. Pesantren juga menanamkan cinta tanah air, nasionalisme dan kesetiaan pada NKRI. Pesantren juga menjaga, merawat, dan melestarikan tradisi keislaman yang khas Indonesia. Seperti tahlilan, maulid, manaqib, dan tradisi keagamaan lokal. Pesantren menyesuaikan Islam dengan kearifan lokal, sehingga Islam diterima masyarakat luas.

Pesantren menjadi tempat pembinaan akhlak dan spiritualitas. Pembinaan akhlak santri, mengajarkan kesederhanaan, tawadhu, disiplin, dan kesabaran. Banyak masyarakat datang ke pesantren untuk konsultasi masalah agama, mencari doa, atau bimbingan rohani. Pesantren di Indonesia bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran multidimensi pendidikan, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan spiritual. Keberadaan pesantren menjadikan masyarakat lebih berdaya, religius, serta memiliki identitas kebangsaan yang kuat (Sawaty & Tandirerung, 2020).

Pesantren Darul Arafah Raya sebagai objek kajian karena pengaruhnya dalam pendidikan agama dan sosial

Pesantren Darul Arafah Raya merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan agama dan sosial di Indonesia. Terletak di daerah yang strategis, pesantren ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karakter dan nilai-nilai sosial di masyarakat sekitarnya. Dalam konteks ini, pesantren ini dapat dijadikan objek kajian yang menarik karena berbagai pengaruh yang ditimbulkannya.

Salah satu aspek utama dari Pesantren Darul Arafah Raya adalah kurikulum pendidikan agama yang komprehensif. Pesantren ini menawarkan berbagai program studi yang mencakup tafsir, hadis, fiqh, dan tasawuf. Metode pengajaran yang digunakan adalah kombinasi antara tradisional dan modern, di mana santri diajarkan untuk memahami teks-teks klasik sambil juga mengembangkan kemampuan kritis dan analitis.

Pendidikan agama di pesantren ini tidak hanya terbatas pada pengajaran di dalam kelas, tetapi juga melibatkan praktik langsung melalui kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian, dan kegiatan sosial. Hal ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral dalam diri santri, sehingga mereka dapat menjadi individu yang berakhlak baik dan bertanggung jawab.

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan maka dapat dipaparkan oleh Dr. H. Harun Lubis, S.T., M.Psi selaku ketua yayasan menjelaskan bahwa Pesantren sendiri pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan politik. Dalam hal ini juga ditegaskan pesantren tidak boleh membatasi diri dengan politik. Hal ini juga ditegaskan dengan lahirnya Undang-Undang Pesantren (Undang -Undang No18 Tahun 2019 meskipun pada Kawasan deli Serdang belum ada implikasi. Kehadiran UU ini dianggap penting guna pengakuan dari setiap kalangan terkait pentingnya peranan dari pesantren itu sendiri. Kemudian pesantren juga membentuk jiwa kepemimpinan yang baik bagi santri, Dimana pembekalan melalui pembelajaran Pancasila dan PPKN menjelaskan bahwa PKN tidak hanya mengajarkan teori tentang negara, demokrasi, dan hak serta kewajiban warga negara, tetapi juga menanamkan nilai-nilai tanggung jawab, kedisiplinan, musyawarah, serta sikap toleran. Melalui pembelajaran ini, santri didorong untuk memahami arti kepemimpinan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

“Di Pesantren Darul Arafah, nilai-nilai yang dipelajari dalam PKN berinteraksi dengan pendidikan agama. Hal ini membentuk karakter santri agar tidak hanya cakap dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan kemampuan mengelola organisasi. Santri yang aktif dalam kegiatan pesantren, seperti organisasi santri, musyawarah kelas, atau kepanitiaan, mempraktikkan langsung nilai PKN, sehingga terlatih menjadi pemimpin yang demokratis, bijaksana, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pelajaran PKN berkontribusi dalam mencetak santri yang berjiwa kepemimpinan, mampu berperan dalam masyarakat, serta siap menghadapi tantangan politik dan sosial di masa depan tanpa meninggalkan nilai moral dan religius.”

Dalam konteks sosial, pesantren ini berperan sebagai agen perubahan. Banyak alumni dari Pesantren Darul Arafah Raya yang berkontribusi dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan politik. Mereka menjadi teladan dalam masyarakat, menunjukkan bahwa pendidikan agama yang diperoleh di pesantren dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini juga dipaparkan seorang alumni yang bernama Ali Sitorus terkait bagaimana peran pesantren sebagai wadah bukan hanya pada Pendidikan tetapi sebagai wadah bagi Masyarakat, “ Pesantren merupakan corong dakwah sekaligus wadah pembinaan generasi Islam di masa depan. Pesantren idealnya mampu menyiapkan santrinya tidak hanya untuk menjadi ulama, tetapi juga pemimpin (umarā’) yang berakhlak dan berilmu. Dengan demikian, pesantren berperan ganda: mendidik kader ulama yang berfungsi sebagai penjaga nilai agama, sekaligus mencetak pemimpin yang mampu mengarahkan umat secara bijak.

Selain itu, pesantren memiliki posisi strategis dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Ulama yang lahir dari pesantren diharapkan hadir sebagai penyejuk di tengah dinamika politik, mampu meredam ketegangan, serta memberikan nasihat moral agar proses politik berjalan dengan damai dan berkeadaban. Dengan peran tersebut, pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pilar moral bangsa yang turut menjaga keharmonisan kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara.

Menurut alumni juga pesantren merupakan suatu dasar pembentuk pemimpin yang baik. Karena secara sederhana melalui proses pemilihan ketua kelas mengikuti organisasi merupakan hal positif dasar bagi para santri dalam kepemimpinan di politik.

Politik identitas dalam konteks pesantren dapat dipahami sebagai upaya menampilkan jati diri keislaman dan nilai-nilai pesantren dalam ranah politik. Hal ini penting karena pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, keagamaan, bahkan politik di masyarakat. Dengan membawa identitas keislaman, pesantren mampu menjadi corong moral yang memperjuangkan kepentingan umat, menjaga nilai akhlak, serta memberi warna positif dalam proses politik.

Namun, politik identitas yang dijalankan pesantren harus tetap berada dalam koridor syariah. Artinya, pesantren tidak boleh terjebak dalam praktik politik yang menghalalkan segala cara, menebar kebencian, atau memecah belah umat hanya demi kepentingan kekuasaan. Identitas Islam yang diusung seharusnya tampil sebagai rahmatan lil ‘alamin, menekankan persaudaraan, musyawarah, dan keadilan. Dengan demikian, politik identitas memang diperlukan bagi pesantren sebagai sarana memperjuangkan aspirasi umat dan memperkuat posisi pesantren dalam kebijakan publik. Akan tetapi, politik identitas itu harus dijalankan secara proporsional, berlandaskan etika Islam, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Dengan cara ini, pesantren dapat tetap menjaga kredibilitasnya sebagai lembaga pendidikan sekaligus berperan aktif dalam pembangunan bangsa. “

Peranan pesantren bagi Masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Peran dalam Pendidikan

- a. Menjadi pusat pendidikan agama Islam (*tafaqquh fiddin*).
 - b. Mengajarkan ilmu-ilmu keislaman klasik dan modern.
 - c. Membentuk karakter santri agar berakhlak mulia.
 - d. Mencetak ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim.
2. Peran dalam Sosial Kemasyarakatan
- a. Menjadi pusat dakwah Islam di masyarakat.
 - b. Menjadi agen perubahan sosial yang menanamkan nilai moral.
 - c. Menjadi tempat penyelesaian masalah sosial (mediasi, nasihat).
 - d. Memberdayakan masyarakat sekitar melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.
3. Peran dalam Politik dan Kebangsaan
- a. Melahirkan tokoh pergerakan dan nasionalisme (seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim).
 - b. Menjadi motor perjuangan kemerdekaan dan pembela NKRI.
 - c. Menanamkan nilai cinta tanah air dalam bingkai Islam.
 - d. Menjadi mitra pemerintah dalam pendidikan, sosial, dan pembangunan.
4. Peran dalam Ekonomi Umat
- a. Mengembangkan kemandirian ekonomi pesantren (koperasi, pertanian, usaha santri).
 - b. Memberikan keterampilan kewirausahaan bagi santri.
 - c. Mendorong ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.
5. Peran dalam Pelestarian Budaya
- a. Menjadi penjaga tradisi keilmuan Islam (kitab kuning, sanad keilmuan).
 - b. Mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai syariat.
 - c. Mengintegrasikan tradisi keagamaan dengan budaya masyarakat.
6. Peran dalam Pembinaan Generasi Muda
- a. Membentuk generasi muslim berilmu dan berakhlak.
 - b. Menyiapkan kader ulama, pemimpin, dan pendakwah.
 - c. Menjadi benteng dari pengaruh negatif globalisasi (Susanto, 2007).

Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh sangat besar dalam pembentukan karakter bangsa. Peran sentral pesantren tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan agama, melainkan juga merambah ke ranah sosial, politik, bahkan ekonomi. Karena posisinya yang kuat di tengah masyarakat, pesantren memiliki dampak positif sekaligus potensi dampak negatif, khususnya dalam konteks pendidikan dan politik.

Dalam bidang politik, pesantren memiliki kontribusi historis yang besar. Sejak era perjuangan kemerdekaan, pesantren melahirkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pergerakan nasional. Nilai-nilai yang ditanamkan pesantren, seperti keadilan, kejujuran, dan kepemimpinan, turut menjadi dasar pembentukan etika politik di Indonesia.

Pesantren juga berfungsi sebagai wadah pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran demokrasi. Santri diajarkan untuk mencintai

tanah air, menjaga persatuan, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa. Dengan demikian, pesantren menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius sekaligus demokratis.

Namun, peran politik pesantren juga tidak lepas dari sisi negatif. Keterlibatan pesantren dalam politik praktis terkadang menimbulkan perpecahan, baik di internal pesantren maupun di kalangan umat. Dukungan pesantren terhadap partai atau kandidat tertentu dapat memicu politisasi agama, yang berpotensi mengaburkan misi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Selain itu, ada risiko ketika pesantren terlalu jauh terjebak dalam kepentingan politik pragmatis. Hal ini bisa mengurangi independensi pesantren sebagai lembaga moral masyarakat. Jika pesantren tidak bijak menjaga jarak dengan kepentingan politik, maka nilai-nilai luhur yang selama ini dijunjung tinggi dapat terkikis oleh kepentingan sesaat.

Pesantren dalam Pendidikan sebagai Pondasi Kepemimpinan

Sejak awal berdirinya, pesantren memikul misi utama untuk **tafaqquh fiddin**, yakni memperdalam pemahaman agama Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, pesantren tidak lagi terbatas pada ruang lingkup keagamaan semata, melainkan juga menyentuh ranah pendidikan umum dan keterampilan hidup. Dalam hal ini, pesantren memberikan pembinaan yang menyeluruh bagi santri, mulai dari aspek spiritual, intelektual, hingga sosial.

Pendidikan di pesantren mengajarkan kedisiplinan, kesederhanaan, keikhlasan, dan kemandirian. Nilai-nilai ini merupakan modal penting bagi seorang pemimpin yang kelak akan menghadapi berbagai tantangan. Santri terbiasa hidup dalam lingkungan yang penuh dengan aturan, pembiasaan ibadah, dan penghormatan kepada guru atau kiai. Pola pendidikan seperti ini melahirkan pribadi yang tahan uji, sabar, serta berkomitmen tinggi terhadap tanggung jawab.

Lebih jauh, pesantren juga memberikan ruang bagi santri untuk mengasah keterampilan kepemimpinan melalui kegiatan organisasi internal seperti OSIS pesantren, kepengurusan asrama, atau kegiatan ekstrakurikuler. Proses belajar ini membentuk mental kepemimpinan sejak dini. Maka, tidak heran jika banyak tokoh bangsa, baik di bidang agama, politik, maupun sosial, berasal dari kalangan pesantren.

Pesantren dalam Politik sebagai Wadah Pendidikan Demokrasi

Selain pendidikan, pesantren memiliki peran yang signifikan dalam politik. Sejarah mencatat bahwa pesantren telah berkontribusi besar dalam perjuangan bangsa, baik melalui perlawanan terhadap penjajahan maupun dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tokoh-tokoh pesantren seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahid Hasyim, dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah contoh nyata bagaimana pendidikan pesantren mampu melahirkan pemimpin yang berpengaruh di ranah politik dan demokrasi.

Pesantren menjadi tempat internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam bentuk musyawarah, mufakat, kebersamaan, serta penghargaan terhadap keberagaman. Meski berbasis agama, pesantren tetap menanamkan sikap toleransi dan keterbukaan. Santri diajarkan untuk menghargai perbedaan, baik dalam pandangan keagamaan maupun

sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, persamaan hak, dan penghormatan terhadap perbedaan.

Keterlibatan pesantren dalam politik juga menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui khutbah, pengajian, dan kegiatan sosial, pesantren seringkali menyampaikan pesan-pesan moral politik yang mengedepankan etika, kejujuran, serta tanggung jawab. Dalam konteks ini, pesantren bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan juga agen sosialisasi politik yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi.

Modal Dasar Demokrasi dari Pesantren

Demokrasi tidak hanya lahir dari sistem pemerintahan modern, melainkan juga dari tradisi sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pesantren dengan segala tradisinya memberikan kontribusi besar dalam menumbuhkan demokrasi di Indonesia. Ada beberapa modal dasar demokrasi yang berasal dari pesantren, antara lain:

1. NilaiMusyawarah
Santri dibiasakan untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah, baik dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Ini menjadi praktik demokrasi yang nyata.
2. Kemandirian
Kehidupan di pesantren mengajarkan santri untuk mandiri, tidak bergantung pada pihak luar. Sikap mandiri ini penting dalam membangun demokrasi yang bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
3. Kedisiplinan dan Etika
Demokrasi membutuhkan aktor-aktor yang beretika. Pesantren menekankan pendidikan moral dan disiplin, sehingga santri terbiasa bertindak dengan integritas.
4. Kesederhanaan dan Kebersamaan
Santri hidup dalam komunitas yang sederhana dan penuh kebersamaan. Nilai ini mendorong lahirnya sikap egaliter yang menjadi ruh dari demokrasi.
5. Penghormatan terhadap Otoritas Ilmu
Di pesantren, kiai dan guru dihormati karena keilmuannya, bukan karena kekayaan atau kedudukan. Ini menumbuhkan prinsip meritokrasi, yang sejalan dengan demokrasi berkualitas (Na'imah & Bawani, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pesantren Darul Arafah Raya mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dalam kurikulumnya melalui pengajaran prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial yang diterapkan dalam kegiatan belajar maupun praktik sosial. Santri dilatih untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial serta politik, menjadikan pesantren sebagai laboratorium demokrasi. Fokus pendidikan juga diarahkan pada pengembangan kepemimpinan yang berintegritas dan visioner melalui kegiatan organisasi, debat, dan diskusi yang menumbuhkan kemampuan komunikasi serta pengambilan keputusan. Selain itu, pesantren mendorong kesadaran politik santri melalui seminar, diskusi, dan kunjungan ke lembaga pemerintah agar mereka memahami pentingnya partisipasi dalam proses politik dan pembangunan bangsa.

Dengan pendekatan pendidikan yang holistik, Pesantren Darul Arafah Raya berperan dalam mencetak generasi muda berkarakter, berwawasan demokratis, dan siap menjadi agen perubahan yang berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan negara.

DAFTAR REFERENSI

- Aminullah, M. S. (2020). Agama Dan Politik: Studi Pemikiran Soekarno Tentang Relasi Agama Dan Negara. *Jurnal Sosiologi Agama*, 14(1), 53. <https://doi.org/10.14421/Jsa.2020.141-03>
- Katimin. (2007). *Politik Islam Indonesia*. Citapustaka Media Perintis.
- Na'imah, I., & Bawani, I. (2021). Penanaman Pendidikan Karakter Demokratis Di Pondok Pesantren. *Jurnal Muara Pendidikan*, 6(2), 228–236. <https://doi.org/10.52060/Mp.V6i2.604>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Harfa Creative.
- Putra, B. N., Khusnan, N. M., & Ikrom, M. (2022). Pengertian Agama Dan Peran Agama Dalam Kesehatan Mental. *Jurnal Muhafadzah: Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling Islam*, 3(1), 21–25. <https://doi.org/10.53888/Muhafadzah.V3i1.571>
- Putra, D. H. (2018). Peran Agama Dalam Negara Menurut Ibnu Khaldun. *Jurnal Manthiq*.
- Rohim, Z. T. A. (2015). Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan Kh. M. Hasyim Asy'ari). *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal Of Islamic Education Studies)*, 3(2), 323. <https://doi.org/10.15642/Pai.2015.3.2.323-345>
- Sawaty, I., & Tandirerung, K. (2020). Strategi Pembinaan Akhlak Santri Di Pondok Pesantren. *Al-Mau'izhah, 1 Nomor 1*(September), 35.
- Subekti, M. Y. A., & Fauzi, M. M. (2018). Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 99–100. <https://doi.org/10.30599/Jpia.V5i2.554>
- Susanto, E. S. E. (2007). Kepemimpinan [Kharismatik] Kyai Dalam Perspektif Masyarakat Madura. *Karsa Journal Of Social And Islamic Culture*.
- Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. . Yogyakarta. Cv. Adi Karya Mandiri.
- Widiatmaka, P., & Yuliandari, E. (2024). Strategi Mengantisipasi Politik Sara Pada Pemilu Melalui Pendidikan Politik Strategy To Anticipate Sara Politics In The Election Through Political Education. *Jurnal Diklat Keagamaan*, 18(1), 58–73.